

**EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
PROVINSI JAWA TENGAH SELAMA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

Liona \*), Supratiwi \*\*), Laila Kholid Alfirdaus \*\*)

Email: [marcelinaliona@gmail.com](mailto:marcelinaliona@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak pada berbagai bidang karena mobilitas setiap orang yang terbatas. Tentunya, menjadi tantangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kinerjanya dengan efektif. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan tatap muka ketika pelaksanaan rapat, *refocusing* anggaran, dan dampak-dampak yang dihasilkan akibat masa krisis tersebut. Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah cukup efektif. Namun, seharusnya lembaga yang efektif ini dapat menunjang kinerja fungsi-fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sayangnya, ketiga fungsi DPRD, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran belum berjalan dengan optimal selama pandemi Covid-19. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain peraturan internal DPRD dan sarana yang menunjang kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah serta data dan informasi, anggaran, dan kualitas anggota dewan yang menghambat kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, terdapat faktor eksternal, yaitu sistem pemilihan umum, sejarah dan iklim politik yang berlaku, serta kurangnya kesadaran dari amanat konstitusi yang menghambat kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal selama pandemi Covid-19.

**Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja DPRD, Covid-19**

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. \*\*) Dosen FISIP Undip

## ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic is a major problem that has an impact on various fields because everyone's mobility is limited. Of course, it is a challenge for the Central Java Provincial DPRD to carry out its performance effectively. This was due to the difficulty of meeting face-to-face when holding meetings, refocusing the budget, and the impacts resulting from the crisis. Departing from the phenomenon above, this study aims to determine the effectiveness of the performance of the Central Java Provincial DPRD during the Covid-19 pandemic and its supporting and inhibiting factors.*

*This study used a qualitative descriptive method supported by primary and secondary data sources. The results of this study indicate that institutionally, the DPRD of Central Java Province is quite effective. However, this effective institution should be able to support the performance of the functions of the DPRD of Central Java Province. Unfortunately, the three DPRD functions, such as the legislative function, the supervisory function, and the budget function have not run optimally during the co-19 pandemic. In addition, there are 2 factors that influence the effectiveness of the performance of the DPRD in Central Java Province, namely internal factors and external factors. These internal factors include the DPRD's internal regulations and facilities that support the performance of the DPRD of Central Java Province as well as data and information, budgets, and the quality of the members of the DPRD which impede the performance of the DPRD of Central Java Province. In addition, there are external factors, namely the general election system, history and the prevailing political climate, as well as low awareness of the constitutional mandate which hinders the performance of the DPRD of Central Java Province. In general, the effectiveness of the performance of the Central Java Provincial DPRD has not been optimal during the co-19 pandemic.*

**Keywords: Effectiveness, DPRD Performance, Covid-19**

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga legislatif, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga legislatif ini memiliki fungsi yang sama, antara lain fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Namun, lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang, yaitu membentuk peraturan daerah bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Provinsi, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, serta masih banyak tugas dan wewenang lainnya.

Selain memiliki tugas dan wewenang, DPRD Provinsi juga memiliki fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi untuk membentuk peraturan daerah dengan kepala daerah. Fungsi

anggaran untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan berbagai program kerja daerah. Untuk melihat optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi dari DPRD Provinsi dapat dilihat dari kinerja lembaga tersebut. Tolak ukur dari efektivitas kinerja DPRD Provinsi dilihat dari *output* yang dihasilkan oleh lembaga tersebut (Sulistiyowati, 2015: 74). Di dalam mengukur kinerja DPRD, diperlukan analisis yang mendalam terkait seberapa efektif DPRD di dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta fungsinya; seberapa banyak produk legislasi yang sudah diundangkan; sejauh mana respon DPRD terhadap suara masyarakat; dan seluas apa transparansi anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009 – 2014, 3 fungsi utama DPRD sudah berjalan, namun belum dapat memuaskan keinginan masyarakat. Hal ini dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah yang sudah direncanakan selalu tersisa dan tidak terlaksana, pengurangan kewenangan DPRD dalam merencanakan sendiri Peraturan Daerah tentang APBD serta rancangan anggaran DPRD itu sendiri, dan masih belum efektif dan efisien dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah APBD walaupun sudah didukung dengan instrument hak-hak DPRD.

Di tengah dunia yang bergerak secara dinamis sehingga menghasilkan banyak perubahan, DPRD juga memiliki tantangan tersendiri yang harus dilalui dalam memaksimalkan kinerjanya. Terlebih lagi, pada tahun 2019, dunia baru saja dilanda pandemi Covid-19. Masyarakat yang tadinya digambarkan sebagai makhluk sosial menjadi makhluk teknologi. Berbagai kegiatan dilakukan secara daring. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh DPRD ini adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya atau kinerjanya dengan efektif di masa pandemi Covid-19 (EMedia DPR RI. 2021). Apalagi masyarakat akan memperhatikan dan memantau kinerja DPRD ini karena masyarakat membutuhkan peran aktif dari lembaga tersebut. Menangani persoalan pandemi Covid-19 ini harus dijalankan dengan kinerja anggota DPRD dengan optimal, jika tidak hal ini akan berdampak pada seluruh aspek, seperti ekonomi, keuangan daerah, sosial, kemanusiaan, dan lain-lain.

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19.

## **PEMBAHASAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19 (tahun 2020 hingga 2022) serta faktor pendorong dan penghambat efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **KERANGKA TEORI**

### **Efektivitas**

Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai tanpa harus memperhatikan biaya atau korban, serta investasi yang akan dikeluarkan sehingga hal ini berhubungan dengan perkembangan dalam menunjang pembangunan seperti yang diharapkan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa suatu yang efektif belum tentu dapat efisien, sedangkan sesuatu yang efisien belum tentu dapat efektif. Organisasi merupakan tempat atau wadah berkumpul suatu individu ataupun kelompok yang memiliki keterikatan fungsi dan tugas dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan mencapai sasaran yang diinginkan ini biasa disebut dengan efektivitas.

Menurut Gulick dan Urwick dalam Sutarto (1992:42) yang dikutip oleh Rofai

(2006) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari sebuah organisasi, antara lain :

- a. Penempatan orang pada struktur harus benar-benar dengan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang karena dapat berpengaruh dengan kinerja dan produktivitas dari organisasi.
- b. Kepemimpinan karena berkaitan dengan cara mempengaruhi dan menggerakkan anggota-anggota organisasi agar tercapainya tujuan organisasi.
- c. Kesatuan perintah dengan garis-garis perintah yang jelas supaya tidak menimbulkan kebingungan terhadap siapa setiap orang harus bertanggung jawab.
- d. Staf khusus dan staf umum diperlukan karena di dalam sebuah organisasi terdapat berbagai pekerjaan berbagai macam jenis yang terkadang diperlukan penanganan khusus.
- e. Unit kerjasasi juga diperlukan karena banyak aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang diserahkan kepada bidang kerja tertentu.
- f. Faktor keseimbangan, yang di mana satuan-satuan organisasi dapat ditempatkan sesuai dengan perannya.

- g. Rentangan kontrol, yang di mana ditujukan untuk menentukan jumlah bawahan yang ideal yang dapat dipimpin dengan seorang atasan.

### **Kinerja**

Penggunaan istilah kinerja ini sudah cukup populer dalam swasta ataupun organisasi pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2005), kinerja adalah konsep yang penting dalam tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Konsep kinerja tidak hanya ditekankan pada prestasi kerja saja atau cara kerja dalam mencapai tujuan, melainkan meliputi kedua aspek tersebut. Contohnya, prestasi kerja yang dihasilkan suatu organisasi sudah banyak, namun cara untuk mencapai prestasi kerja tersebut melanggar peraturan yang berlaku ataupun sebaliknya sehingga dapat dikatakan bahwa kinerjanya sangat buruk.

Menurut Kadji, dkk (2011:19-22), dalam konteks DPRD Provinsi Jawa Tengah, pengukuran kinerja akan dilihat dari beberapa fungsi, yaitu :

- a. Kinerja Fungsi Legislasi.
- b. Kinerja Fungsi Pengawasan.
- c. Kinerja Fungsi Anggaran.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD**

Pendapat dari Thaib (2000:65) yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

a. Faktor Internal

1. Peraturan Tata Tertib.

Mekanisme kerja internal lembaga legislatif diatur dalam peraturan Tata Tertib yang dilihat terlalu rumit. Hal ini membuat anggota legislatif menjadi sulit melaksanakan tugas dan berperan besar. Misalkan, penggunaan hak DPRD yang harus diusulkan 20 orang dari 2 fraksi. Hal ini sulit dilakukan karena minimal anggota untuk melaksanakan hak tersebut terlalu besar. Parahnya lagi, penolakan dari fraksi lain hanya karena kompetisi yang tidak sehat antar fraksi.

2. Kualitas Anggota.

Faktor ini penting karena mengoptimalkan peran dari lembaga legislatif. Peran lembaga legislatif tidak akan dapat tercapai jika anggota legislatif memiliki kualitas yang baik.

3. Sarana dan Anggaran.

Dana yang terbatas akan menghambat pengembangan sarana penunjang untuk kelancaran lembaga legislatif. Misalkan, ruang kerja untuk anggota dan staf ahli, pelayanan informasi untuk anggota, dan lain-lain.

4. Faktor penghambat lain adalah tradisi dan sejarah dalam lembaga legislatif setelah kembali pada UUD 1945 yang menempatkan DPRD dalam posisi yang lemah jika dibandingkan pemerintah.

b. Faktor Eksternal

1. Sistem Pemilihan.

Calon anggota legislatif biasanya diajukan oleh partai politik sehingga banyak tokoh yang karbitan. Sistem pemilihan ini tidak mendukung adanya calon legislatif yang berkualitas.

2. Latar Belakang Sejarah dan Iklim Politik yang Berlaku.

Dominasi lembaga eksekutif terhadap lembaga legislatif sangat kuat. Hal ini dibuktikan pada pasal 4 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan pemerintah”. Dalam konteks DPRD juga terdapat UU No. 5

Tahun 1974 yang mengatakan bahwa Kepala Daerah memiliki kekuasaan yang lebih daripada kekuasaan DPRD sendiri.

3. Kurang Kesadaran terhadap Amanat Kontitusi.

UUD 1945 menjelaskan bahwa "... yang penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan ...". Kenyatannya, suara lembaga legislatif tidak pernah didengar dengan sungguh-sungguh oleh lembaga eksekutif sehingga bertentangan dengan amanat kontitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjawab permasalahan yang diteliti dengan mempelajari suatu objek yang ingin diteliti. Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah informan yang dapat menjelaskan hal-hal yang akan diteliti, seperti anggota dewan yang bersangkutan ataupun staf-staf dewan tersebut yang

mengurus terkait kinerja anggota ataupun lembaga di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Analisis Efektivitas Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Untuk mencapai tujuan DPRD Provinsi Jawa Tengah, diperlukan susunan suatu lembaga yang efektif. Dari hasil penelitian terhadap DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga atau organisasi, yakni sebagai berikut :

- a. Dari segi penempatan anggota dewan yang terjadi adalah penempatan anggota dewan tidak berdasarkan latar belakang pendidikannya. Penempatan tersebut dilakukan pengurus partai yang disesuaikan dengan softskill dan pengalaman yang dimiliki.
- b. Dari segi kepemimpinan kelembagaan, kepemimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah memang mampu mengayomi anggota lainnya dan mengorganisir lembaga untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Kelembagaan ini dipimpin oleh 1 orang ketua dan 4 wakil ketua. Jumlah pimpinan tersebut disesuaikan dengan peraturan yang ada. Untuk 120 anggota dewan dapat dipimpin oleh 1 orang ketua dan 4 wakil ketua. Dengan menerima perintah dari 1 orang pemimpin, hal ini membuat tugas

menjadi lebih terarah daripada diperintah dengan orang banyak. Tentunya, seluruh garis-garis perintah ini sudah sangat jelas.

- d. Setiap anggota dewan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh 1 staf pribadi. Selain itu, menurut Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, terdapat tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dari Fraksi. Tenaga ahli ini diisi oleh orang-orang yang diusulkan oleh Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan dari Pimpinan DPRD. Sedangkan pakar berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- e. Peran-peran dari tiap-tiap unit kerja memang sudah jelas dan tidak ada yang tumpah tindih dari bidang-bidang yang ada. Unit kerja tersebut, antara lain adalah alat kelengkapan, fraksi, panitia khusus, panitia angket, tenaga ahli, pakar, dan sekretariat DPRD. Tiap unit kerja juga sudah terdapat usaha untuk melaksanakan tupoksi dari tiap unit kerja tersebut.
- f. Mayoritas menjelaskan jumlah atasan dan bawahan sudah ideal. Hal ini

dikarenakan sudah termaktub dengan jelas bahwa anggota jumlah anggota tiap alat kelengkapan sudah diatur dengan jelas di dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah. Contoh, diharuskan jumlah anggota dewan tiap Komisi 23 orang, Badan Musyawarah berjumlah 32 orang yang sudah terbagi ke dalam beberapa Fraksi, Bapemperda 23 orang, Badan Anggaran 37 orang, dan lain-lain.

### **Analisis Efektivitas Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Berikut adalah kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah selama Pandemi Covid-19 :

#### a. Kinerja Fungsi Legislasi

Terdapat 30 peraturan daerah yang dihasilkan sepanjang 2020 – 2022. Jika dilihat pada tahun 2020 yang di mana awal dari pandemi Covid-19, peraturan daerah yang dihasilkan berjumlah sedikit. Faktor pertama dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap berbagai aturan. Salah satunya adalah *refocusing* anggaran sehingga pembentukan peraturan daerah yang membutuhkan dana juga menjadi terhambat. Faktor kedua dikarenakan adanya program pembentukan peraturan daerah prioritas tahun 2020 yang tertunda



sehingga dialihkan pada tahun 2021. Hal ini menimbulkan lonjakan peraturan yang disahkan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 memang masih banyak ketidaktercapaian realisasi raperda karena masih dalam fase pandemi Covid-19. Hal ini akan memberikan dampak kepada semua kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dialihkan dari program kegiatan Raperda menuju Pendampingan Daerah Pemilihan. Penyusunan dan pembahasan Raperda ini membutuhkan diskusi yang substantif sehingga sulit ketika diadakan pembatasan pada kerumunan. Kendala lainnya juga karena masih ada Raperda yang belum tersampaikan oleh Gubernur. Berbeda dengan tahun 2022, target Raperda sendiri sebanyak 25. Namun, baru terealisasi sebanyak 16 Raperda. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan regulasi yang menyebabkan proses penyusunan Raperda perlu kajian yang lebih mendalam. Selain itu, dikarenakan lamanya proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak sesuai dengan tenggat waktu.

b. Kinerja Fungsi Pengawasan

Pada dasarnya, memang luas sekali ruang lingkup yang diawasi oleh DPRD ini. . Pengawasan DPRD ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, kerjasama internasional daerah, dan mengawasi layanan publik. Hal tersebut sudah terbagi dengan beberapa komisi sesuai dengan mitra kerjanya. Sejak pandemi Covid-19, DPRD membentuk program e-pengawasan sebagai wujud pengoptimalan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD berbagai macam bentuknya, seperti pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan gubernur dan pengawasan terhadap isu-isu strategis yang bersumber dari media dan aspirasi masyarakat. Sistem ini baru dimulai pada Februari 2022. Dalam memasukkan data, basis analisisnya dari TA sehingga terdapat pendalaman terhadap tindakan untuk penyelesaian masalah yang ada. Harapannya, tindak lanjut dari sistem ini juga melibatkan dinas terkait.

Cornelius Gea, selaku staf LBH Kota Semarang merasa fungsi

pengawasan DPRD ini kurang substantif karena hanya mengomentari kelakuan dari Gubernur Jawa Tengah saja. Jarang sekali memberikan kritik ataupun masukan terhadap kinerja profesional. Dari hasil penelitian di atas, narasumber yang berada di internal DPRD merasa sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal. Namun, Cornelius Gea merasa pengawasan DPRD tidak berdasarkan hal-hal yang substansial terbukti ketika penurunan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

c. Kinerja Fungsi Anggaran

Pandemi Covid-19 mempengaruhi fungsi anggaran juga. Terlebih lagi, jumlah anggaran disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Selama pandemi ini ada *refocusing* dan semuanya harus disesuaikan. Dapat disimpulkan penetapan besaran anggaran per tahun itu dipengaruhi oleh pendapatan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pos anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang mengalami penurunan daripada APBD 2020 sebelum perubahan. Pengurangan target anggaran pada 2 komponen utama pendapatan asli daerah adalah bentuk dari rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah akibat dampak pandemi Covid-19. Belanja daerah juga dianggarkan menurun sebesar 26,8 triliun pada perubahan anggaran tahun 2020. Realisasi anggaran pendapatan juga mengalami penurunan daripada tahun lalu.

Di sisi lain, pembahasan anggaran oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah tepat waktu. Selain itu, kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah hampir sekitar Rp 30 miliar untuk mendukung program percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, DPRD Jawa Tengah memastikan bahwa anggaran-anggaran *refocusing* untuk penanganan Covid-19 terserap dengan baik.

**Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah selama Pandemi Covid-19**

Dalam melaksanakan kinerjanya selama pandemi Covid-19, tentu ada faktor lain juga yang ikut mempengaruhinya. Terdapat faktor yang dapat mendukung kinerja lembaga, namun ada juga yang menghambat kinerja lembaga. Faktor tersebut dapat datang dari internal maupun eksternal lembaga.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi

Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 tentu sangat beragam, seperti peraturan internal DPRD, data dan informasi, kualitas dari anggota legislatif, serta sarana dan anggaran.

Peraturan internal DPRD dapat mempengaruhi kinerjanya apabila dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan seidealnya. Stephanus Sukirno memberikan keterangan bahwa aturan dewan itu tidak banyak mengatur, melainkan memberikan gambaran yang bahwasanya anggota dewan harus mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran. tata tertib anggota dewan ini sangat mendukung kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi, tata tertib atau yang biasa disebut peraturan internal DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memang mengikuti kondisi yang ada, khususnya ketika pandemic Covid-19. Peraturan internal DPRD tidak menghambat kinerja DPRD, melainkan mendukung.

Faktor berikutnya adalah data dan informasi. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan DPRD dalam data dan informasi ketika pandemi Covid-19. Apalagi dalam membentuk suatu kebijakan dibutuhkan data dan informasi. DPRD memang sudah mendapatkan data dan informasi

melalui berbagai media. Namun, ketika masa pandemi Covid-19, DPRD tidak paham kondisi lapangan. Hal ini membuat NGO-NGO yang mencari data tersebut. Selain itu, tidak ada bantuan anggaran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk NGO dalam melakukan riset tersebut.

Berikutnya adalah kualitas dari anggota legislatif. Kualitas anggota legislatif sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kualitas dari tiap anggota dewan jelas berbeda, terlebih lagi latar belakang dari tiap anggota dewan berbeda-beda. Tentunya, untuk mengetahui kualitas dari anggota dewan tersebut diperlukan suatu rumusan yang berisi kriteria-kriteria anggota dewan yang berkualitas. Kualitas seseorang tidak cukup dinilai dari 1 aspek saja. Dibutuhkan penilaian yang komprehensif. Apabila kualitas dewan buruk tentu saja ini mempengaruhi kinerja dari dewan itu, terlebih lagi ketika pandemi Covid-19.

Selain kualitas anggota dewan, sarana dan anggaran juga mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Memang secara anggaran ketika pandemi Covid-19 ini sedikit menghambat kinerja DPRD karena banyak pos-pos anggaran yang mengalami penyusutan sehingga

DPRD sendiri harus memutar otak agar kegiatannya berjalan, namun dengan dana yang secukupnya. Segala fasilitas untuk anggota dewan sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan adanya gedung baru yang ditempati anggota dewan.

b. Faktor Eksternal

Salah satu faktor eksternal adalah sistem pemilihan anggota dewan. Apabila sistem pemilihan anggota dewan sudah baik, otomatis anggota dewan yang dihasilkan juga berkualitas. Salah satu permasalahannya adalah gonjangan-janging minimal syarat pendidikan anggota dewan selalu menjadi bahasan masyarakat. Banyak orang berpikir latar belakang pendidikan anggota dewan ini berpengaruh terhadap kualitas anggota dewan. Stephanus Sukirno, selaku Ketua Badan Kehormatan menganggap sistem rekrutmen anggota dewan tidak memandang kompeten. Dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan anggota dewan yang ada belum bisa menghasilkan anggota dewan yang memiliki kualitas yang setara.

Selain permasalahan pemilihan umum, ada faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Faktor lain tersebut

adalah sejarah dan iklim politik yang berlaku. Zaman dahulu, lembaga legislatif atau dalam konteks ini adalah DPRD ini memang memiliki posisi yang lebih lemah daripada pemerintah. Dari internal DPRD sendiri menyatakan bahwa untuk sekarang ini, lembaga legislatif bersinergi dengan lembaga eksekutif. Namun, pendapat dari eksternal DPRD menyatakan bahwa pemerintah yang diwakili Ganjar Pranowo sebagai Gubernur sangat dominan daripada lembaga legislatif.

Selanjutnya, faktor eksternal lainnya adalah kurangnya kesadaran dari amanat konstitusi. Poin ini erat kaitannya dengan poin sebelumnya terkait dari dominasi lembaga eksekutif. Pola komunikasi antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif yang dikatakan oleh Enar Ratrianty Assa, selaku Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah baik-baik saja. Namun, tidak dipungkiri masih adanya sedikit gesekan antar lembaga tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, DPRD memiliki kelembagaan yang cukup efektif dalam mendukung

kinerjanya. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menguji efektivitas lembaga tersebut sudah mendukung untuk DPRD dapat mencapai kinerjanya. Namun, disayangkan adanya Pandemi Covid-19 ini membuat kinerja DPRD terpengaruh. Kinerja tersebut, antara lain adalah kinerja fungsi legislasi, kinerja fungsi pengawasan, dan kinerja fungsi anggaran. Secara kinerja dari 3 fungsi tersebut memang sudah ada, namun belum optimal saja ketika masa pandemi Covid-19, yang di mana seharusnya mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam bekerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari peraturan internal DPRD, data dan informasi, kualitas anggota, serta sarana dan anggaran. Faktor eksternal terdiri dari sistem pemilihan umum, sejarah dan iklim politik yang berlaku, kurangnya kesadaran dari amanat konstitusi. Seluruh faktor yang disebutkan di atas jelas sangat mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah, baik menjadi pendukung maupun menjadi penghambat.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, maka terdapat beberapa saran

yang ingin saya sampaikan. Harapannya dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk mengembangkan efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah ketika menghadapi situasi darurat, seperti pandemi Covid-19. Adapun saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk penempatan anggota dewan pada struktur lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat sesuai dengan latar belakang pendidikan anggota dewan tersebut.
2. DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menggali banyak data dan informasi terkait pandemi Covid-19 dengan cara bekerja sama dengan kelompok aktivis.
3. Dengan adanya masa krisis pandemi Covid-19, diharapkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat lebih berkomitmen dalam membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19.
4. Untuk peneliti berikutnya, dapat mengkaji lebih lanjut mengenai *refocusing* anggaran di masa pandemi Covid-19.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik : Penentuan harga pelayanan publik, Yogyakarta.

Sutarto (1991), *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta : (Gadjah Mada University Press)

Thaib, Dahlan, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Gondokusumo, M. T., Kushandajani, K., & Fitriyah, F. (2022). ANALISIS KINERJA LEGISLASI LEMBAGA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 6(2), 149- 163.

Sulistiyowati, S. (2017). KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009-2014. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 74-79.

### **Skripsi / Tesis**

Rofai, A. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

### **Laporan Penelitian**

Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah*. Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Cornelius Gea, dkk.2020. *Komunike Covid-19 KOBAR (Koalisi Rakyat Bantu Rakyat)*. Lintas Nalar, CV

Kadji, Yulianto. 2011. *Analisis Kinerja Kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo*. Universitas Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2021. *LKJIP Tahun 2020*. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2022. *LKJIP Tahun 2021*. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2023. *LKJIP Tahun 2022*. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

### **Artikel**

EMedia DPR RI. 2021. "Peran, Kinerja, dan Tantangan DPR RI Masa Pandemi",

<https://emedia.dpr.go.id/article/peran-kinerja-dan-tantangan-dpr-ri-masa-pandemi/> (diakses pada tanggal 15 September 2022)

### **Website Instansi**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 20 Desember 2022)

DPRD Provinsi Jawa Tengah. “Portal Resmi DPRD Jawa Tengah”,

<https://dprd.jatengprov.go.id/> (diakses pada tanggal 23 Desember 2022)

JDIH Jawa Tengah, <https://jdih.jatengprov.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Mei 2023)